KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5000-1680-1301-2102

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692025/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 28 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(04)	DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(692025)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Sebesar	:	Rp. 30.178.304.000	(TIGA PULUH MILIAR SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	30.178.304.000
135.01.WA.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp.	30.178.304.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	30.178.304.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 30.178.304.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5000-1680-1301-2102

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				30.178.304.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				30.178.304.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	23.699.119.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah		2.00	Laporan	127.940.000
		02 EBA.002	Layanan Kerja Sama		1.00	Laporan	23.952.000
		03 EBA.956	Layanan BMN		1.00	Layanan	10.000.000
		04 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.00	Layanan	221.144.000
		05 EBA.959	Layanan Protokoler		1.00	Layanan	234.370.000
		06 EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	164.819.000
		07 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	22.916.894.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		148,00	Unit, m2, Paket	5.121.567.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal		141.00	Unit	2.041.545.000
		02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal		7.00	Unit	3.080.022.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		127,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	355.724.000
Rincian Output	:	01 EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM		1.00	Layanan	20.740.000
		02 EBC.954	Layanan Manajemen SDM		126.00	Orang	334.984.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.001.894.000
Rincian Output	:	01 EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		2.00	Laporan	424.260.000
		02 EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor WIlayah		3.00	Dokumen	53.800.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5000-1680-1301-2102

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Layanan Manajemen Kinerja Internal				Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
03	EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	2.00	Laporan	237.680.000
04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Laporan	79.916.000
05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	19.000.000
06	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Laporan	160.958.000
07	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan	26.280.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025

DS:5000-1680-1301-2102

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp. 30.178.304.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 30.178.304.000	(2) RPLN	US$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp. 0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025

DS:5000-1680-1301-2102

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692025	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**	**18.612.048**	**6.444.689**	**5.121.567**	**-**	**-**	**30.178.304**		
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**18.612.048**	**6.444.689**	**5.121.567**	**-**	**-**	**30.178.304**		
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**	**18.612.048**	**6.444.689**	**5.121.567**	**-**	**-**	**30.178.304**		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.612.048	5.087.071	-	-	-	23.699.119	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	18.612.048	5.087.071	-	-	-	23.699.119	030@	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	5.121.567	-	-	5.121.567	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	-	5.121.567	-	-	5.121.567	030@	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	355.724	-	-	-	355.724	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	355.724	-	-	-	355.724	030@	
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	1.001.894	-	-	-	1.001.894	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025

DS:5000-1680-1301-2102

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	1.001.894	-	-	-	1.001.894	030@	
	JUMLAH	**18.612.048**	**6.444.689**	**5.121.567**	**-**	**-**	**30.178.304**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5000-1680-1301-2102

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692025) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692025**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.192.807	1.843.670	2.960.224	1.686.622	1.681.072	2.843.572	1.980.653	1.682.572	1.682.572	1.684.372	1.689.342	9.250.825	30.178.304
		BELANJA PEGAWAI	1.153.250	1.272.851	2.500.000	1.350.000	1.350.000	2.500.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.735.947	18.612.048
		BELANJA BARANG	39.557	570.820	345.574	336.622	331.072	343.572	630.653	332.572	332.572	334.372	339.342	2.507.960	6.444.689
		BELANJA MODAL	0	0	114.650	0	0	0	0	0	0	0	0	5.006.917	5.121.567
	135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.192.807	1.843.670	2.960.224	1.686.622	1.681.072	2.843.572	1.980.653	1.682.572	1.682.572	1.684.372	1.689.342	9.250.825	30.178.304
		51 BELANJA PEGAWAI	1.153.250	1.272.851	2.500.000	1.350.000	1.350.000	2.500.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.735.947	18.612.048
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	39.557	570.820	345.574	336.622	331.072	343.572	630.653	332.572	332.572	334.372	339.342	2.507.960	6.444.689
		53 BELANJA MODAL	0	0	114.650	0	0	0	0	0	0	0	0	5.006.917	5.121.567

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025
IV A. B L O K I R

DS:5000-1680-1301-2102

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692025] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
692025	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	6.914.770
	52 Belanja Barang	Rp.	1.907.853
	53 Belanja Modal	Rp.	5.006.917
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**		
7099.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	91.754
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	33.600
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	36.975
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	14.800
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522141 Belanja Sewa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	52.050
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	30.000
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	510.646
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	25.670
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7099.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Catatan Mobil Unit Pameran 1 Unit		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.926.895
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)		
	Catatan Rehab Rumah Dinas Type B (NUP 5 :130 M2) Rehab Rumah Dinas Type C (NUP 6 : 74 M2, NUP 9 : 77 M NUP 7 : 70 M2, NUP 13 : 70 M2), Rehab Gedung Utama : 1600 M2, Daya Listrik1 Paket,		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.080.022
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7099.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	15.976
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025
IV A. B L O K I R

DS:5000-1680-1301-2102

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692025] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.800 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.200 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 210.918 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.830 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.240 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.520 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7099.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal** 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 181.824 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.200 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 483.850 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692025/2025
IV B. C A T A T A N

DS:5000-1680-1301-2102

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692025] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
692025	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**				
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**				
7099.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	3.345.902		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	* Mobil Unit Pameran 1 Unit	Rp.	265.880		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan				
	* Rehab Rumah Dinas Type B (NUP 5 :130 M2) Rehab Rumah Dinas Type C (NUP 6 : 74 M2, NUP 9 : 77 M NUP 7 : 70 M2, NUP 13 : 70 M2), Rehab Gedung Utama : 1600 M2, Daya Listrik1 Paket,	Rp.	3.080.022		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:3246-2563-6776-1471

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692065/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 28 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi	:	(04)	DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(692065)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Sebesar	:	Rp. 2.429.950.000	(DUA MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.429.950.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	2.429.950.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.429.950.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA	(030)	Rp.	2.429.950.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3246-2563-6776-1471

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				2.429.950.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				2.429.950.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan				
		2. 01	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah				
		3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		5,00	layanan	1.318.618.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		4.00	layanan	1.273.144.000
		02 BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		1.00	layanan	45.474.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga		1,00	Perkara	6.940.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		1.00	Perkara	6.940.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		7,00	Lembaga	1.104.392.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah		7.00	Lembaga	1.104.392.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2025

DS:3246-2563-6776-1471

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

		Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp. 2.429.950.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 0	(2) RPLN	US$ 0	Rp. 0
2. PNBP	Rp. 2.429.950.000	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	(2) RHLN	US$ 0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:3246-2563-6776-1471

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692065	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**	**-**	**2.429.950**	**-**	**-**	**-**	**2.429.950**		
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**2.429.950**	**-**	**-**	**-**	**2.429.950**		
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**	**-**	**2.429.950**	**-**	**-**	**-**	**2.429.950**		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	1.318.618	-	-	-	1.318.618	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
04	PNBP	-	1.318.618	-	-	-	1.318.618	030@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	-	6.940	-	-	-	6.940	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
04	PNBP	-	6.940	-	-	-	6.940	030@	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	1.104.392	-	-	-	1.104.392	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
04	PNBP	-	1.104.392	-	-	-	1.104.392	030@	
	JUMLAH	**-**	**2.429.950**	**-**	**-**	**-**	**2.429.950**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3246-2563-6776-1471

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (692065) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692065**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	107.933	80.648	84.544	115.258	115.544	76.544	68.544	65.544	75.541	1.639.850	2.429.950
		BELANJA BARANG	0	0	107.933	80.648	84.544	115.258	115.544	76.544	68.544	65.544	75.541	1.639.850	2.429.950
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	0	107.933	80.648	84.544	115.258	115.544	76.544	68.544	65.544	75.541	1.639.850	2.429.950
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	107.933	80.648	84.544	115.258	115.544	76.544	68.544	65.544	75.541	1.639.850	2.429.950

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2025
IV A. B L O K I R

DS:3246-2563-6776-1471

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692065] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
692065	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	1.639.850
	52 Belanja Barang	Rp.	1.639.850
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**		
7110.BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	63.545
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.350
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	585
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	18.600
	kebijakan penyesuaian belanja negara		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	98.117
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	245.636
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	56.100
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	325.685
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.BCB	**Perkara Hukum Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.900
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	5.040
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	124.872
	kebijakan penyesuaian belanja negara		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	326.100
	kebijakan penyesuaian belanja negara		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2025
IV A. B L O K I R

DS:3246-2563-6776-1471

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692065] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan kebijakan penyesuaian belanja negara	Rp.	16.600		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan kebijakan penyesuaian belanja negara	Rp.	138.600		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan kebijakan penyesuaian belanja negara	Rp.	9.520		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan kebijakan penyesuaian belanja negara	Rp.	198.600		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692065/2025
IV B. C A T A T A N

DS:3246-2563-6776-1471

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692065] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0195-1046-2503-0097

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693012/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 28 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
3. Provinsi	:	(04)	DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(693012)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Sebesar	:	Rp. 3.090.003.000	(TIGA MILIAR SEMBILAN PULUH JUTA TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.090.003.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp.	3.090.003.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	3.090.003.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA	(030)	Rp.	3.090.003.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0195-1046-2503-0097

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				3.090.003.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				3.090.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah				
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah				
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		2.850,00	Orang	2.998.215.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		1200.00	Orang	2.039.004.000
		02 BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		1500.00	Orang	899.211.000
		03 BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		150.00	Orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BKB	Pemantauan produk		7,00	Produk, Layanan	91.788.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		7.00	Layanan	91.788.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2025

DS:0195-1046-2503-0097

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp. 3.090.003.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 0	(2) RPLN	US$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp. 3.090.003.000	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0195-1046-2503-0097

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693012	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**	**-**	**3.090.003**	**-**	**-**	**-**	**3.090.003**		
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**3.090.003**	**-**	**-**	**-**	**3.090.003**		
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**-**	**3.090.003**	**-**	**-**	**-**	**3.090.003**		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	2.998.215	-	-	-	2.998.215	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
04	PNBP	-	2.998.215	-	-	-	2.998.215	030@	
7121.BKB	Pemantauan produk	-	91.788	-	-	-	91.788	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
04	PNBP	-	91.788	-	-	-	91.788	030@	
	JUMLAH	**-**	**3.090.003**	**-**	**-**	**-**	**3.090.003**		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0195-1046-2503-0097

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693012**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	76.240	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	2.590.003	3.090.003
		BELANJA BARANG	0	0	76.240	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	2.590.003	3.090.003
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	0	76.240	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	2.590.003	3.090.003
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	76.240	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	2.590.003	3.090.003

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2025
IV A. B L O K I R

DS:0195-1046-2503-0097

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693012] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
693012	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	2.590.003
	52 Belanja Barang	Rp.	2.590.003
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**		
7121.BDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	309.116
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	46.200
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	227.448
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	71.500
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	210.335
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	157.476
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	20.610
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	68.773
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.405.507
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7121.BKB	**Pemantauan produk**		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	11.410
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	50.628
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	11.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693012/2025
IV B. C A T A T A N

DS:0195-1046-2503-0097

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693012] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7007-4344-4624-1561

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693045/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 28 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi	:	(04)	DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(693045)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Sebesar	:	Rp. 645.000.000	(ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	645.000.000
135.03.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	645.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	645.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 645.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7007-4344-4624-1561

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi				645.000.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				645.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		22,00	Rekomendasi Kebijakan	578.745.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah		22.00	Rekomendasi Kebijakan	578.745.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		25,00	Orang	59.965.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		25.00	Orang	59.965.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	6.290.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah		1.00	Laporan	6.290.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2025

DS:7007-4344-4624-1561

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp. 645.000.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 645.000.000	(2) RPLN	US$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp. 0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2025

DS:7007-4344-4624-1561

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693045	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**	**-**	**645.000**	**-**	**-**	**-**	**645.000**		
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**645.000**	**-**	**-**	**-**	**645.000**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**	**-**	**645.000**	**-**	**-**	**-**	**645.000**		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	578.745	-	-	-	578.745	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	578.745	-	-	-	578.745	030@	
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	-	59.965	-	-	-	59.965	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	59.965	-	-	-	59.965	030@	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	6.290	-	-	-	6.290	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	6.290	-	-	-	6.290	030@	
	JUMLAH	**-**	**645.000**	**-**	**-**	**-**	**645.000**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7007-4344-4624-1561

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693045) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693045**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	38.860	16.170	16.920	22.800	25.930	16.500	23.820	161.860	189.855	132.286	645.000
		BELANJA BARANG	0	0	38.860	16.170	16.920	22.800	25.930	16.500	23.820	161.860	189.855	132.286	645.000
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	0	38.860	16.170	16.920	22.800	25.930	16.500	23.820	161.860	189.855	132.286	645.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	38.860	16.170	16.920	22.800	25.930	16.500	23.820	161.860	189.855	132.286	645.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2025
IV A. B L O K I R

DS:7007-4344-4624-1561

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693045] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
693045	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	484.000
	52 Belanja Barang	Rp.	484.000
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**		
7129.ABD	**Kebijakan Bidang Hukum dan HAM**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	80.270
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.600
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	281.560
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	39.450
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	24.060
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.ADG	**Standarisasi Profesi dan SDM**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	17.110
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.100
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	5.025
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	24.060
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.015
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.750
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693045/2025
IV B. C A T A T A N

DS:7007-4344-4624-1561

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693045] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0726-5325-0021-3689

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693113/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 28 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(11)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. Provinsi	:	(04)	DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(693113)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Sebesar	:	Rp. 2.734.043.000	(DUA MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.734.043.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 2.734.043.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025

DS:0726-5325-0021-3689

Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	148.890.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	148.890.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.585.153.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	2.585.153.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				148.890.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah				148.890.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan		59.500.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1.00	Rekomendasi Kebijakan		59.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga		89.390.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1.00	Lembaga		89.390.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				2.585.153.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				2.585.153.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah				
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah				
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9,00	Lembaga		69.449.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	9.00	Lembaga		69.449.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat		204.446.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2.00	Kelompok Masyarakat		50.496.000
		02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	5.00	Kelompok Masyarakat		153.950.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		1,00	Orang	45.074.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah		1.00	Orang	45.074.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		22,00	Lembaga	132.559.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah		22.00	Lembaga	132.559.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	34.795.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	dokumen	34.795.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	29.400.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum		1.00	Laporan	29.400.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		220,00	Orang	1.760.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	220.00	Orang	1.760.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		29,00	Kelompok Masyarakat	309.430.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	29.00	Kelompok Masyarakat	309.430.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025

DS:0726-5325-0021-3689

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

			Ket :			Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.734.043.000		a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.734.043.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693113	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**	**-**	**2.734.043**	**-**	**-**	**-**	**2.734.043**		
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**148.890**	**-**	**-**	**-**	**148.890**		
7133	**Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah**	**-**	**148.890**	**-**	**-**	**-**	**148.890**		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	59.500	-	-	-	59.500	04 . 51	
01	RM	-	59.500	-	-	-	59.500	030@	
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	89.390	-	-	-	89.390	04 . 51	
01	RM	-	89.390	-	-	-	89.390	030@	
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**2.585.153**	**-**	**-**	**-**	**2.585.153**		
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**	**-**	**2.585.153**	**-**	**-**	**-**	**2.585.153**		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	69.449	-	-	-	69.449	04 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025

DS:0726-5325-0021-3689

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	69.449	-	-	-	69.449	030@	
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	204.446	-	-	-	204.446	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	204.446	-	-	-	204.446	030@	
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	-	45.074	-	-	-	45.074	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	45.074	-	-	-	45.074	030@	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	132.559	-	-	-	132.559	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	132.559	-	-	-	132.559	030@	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik	-	34.795	-	-	-	34.795	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	34.795	-	-	-	34.795	030@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	29.400	-	-	-	29.400	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	29.400	-	-	-	29.400	030@	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	1.760.000	-	-	-	1.760.000	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	1.760.000	-	-	-	1.760.000	030@	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	-	309.430	-	-	-	309.430	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	309.430	-	-	-	309.430	030@	
	JUMLAH	**-**	**2.734.043**	**-**	**-**	**-**	**2.734.043**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693113) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693113**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	17.720	135.530	147.750	133.000	138.800	74.633	15.000	0	0	2.071.610	2.734.043
		BELANJA BARANG	0	0	17.720	135.530	147.750	133.000	138.800	74.633	15.000	0	0	2.071.610	2.734.043
	135.11.BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	5.250	0	9.750	0	0	0	0	0	0	133.890	148.890
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	5.250	0	9.750	0	0	0	0	0	0	133.890	148.890
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	0	12.470	135.530	138.000	133.000	138.800	74.633	15.000	0	0	1.937.720	2.585.153
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	12.470	135.530	138.000	133.000	138.800	74.633	15.000	0	0	1.937.720	2.585.153

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
IV A. B L O K I R

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693113] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
693113	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	2.071.610
	52 Belanja Barang	Rp.	2.071.610
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**		
7133	**Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah**		
7133.ABD	**Kebijakan Bidang Hukum dan HAM**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	14.475
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	4.800
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.800
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	14.425
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7133.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	14.790
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	12.000
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.600
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	36.000
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.500
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	15.500
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**		
7136.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	22.600
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	5.400
	Efisiensi Anggaran		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
IV A. B L O K I R

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693113] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	13.849
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	12.600
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BDD	**Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	52.175
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	12.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	24.930
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	17.075
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	12.416
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	55.850
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BIB	**Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	2.850
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	1.200
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	18.624
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	2.400
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran	Rp.	27.510
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.600

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
IV A. B L O K I R

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693113] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	81.049
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	5.400
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BMA	**Data dan Informasi Publik**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	6.795
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.600
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.400
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.400
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.600
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.400
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.QBA	**Layanan Bantuan Hukum Perseorangan**		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.300.961
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.QBC	**Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat**		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	231.036
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693113/2025
IV B. C A T A T A N

DS:0726-5325-0021-3689

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693113] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7610-3581-9074-4727

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693147/2025

Revisi ke 02
Tanggal : 28 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(12)	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi	:	(04)	DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(693147)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Sebesar	:	Rp. 337.999.000	(TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	337.999.000
135.12.WA.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp.	337.999.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	337.999.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 337.999.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7610-3581-9074-4727

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen				337.999.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				337.999.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		4,00	Rekomendasi Kebijakan	326.170.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		4.00	Rekomendasi Kebijakan	326.170.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		50,00	orang	11.829.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		50.00	orang	11.829.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2025

DS:7610-3581-9074-4727

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp. 337.999.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 337.999.000	(2) RPLN	US$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp. 0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2025

DS:7610-3581-9074-4727

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693147	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**	**-**	**337.999**	**-**	**-**	**-**	**337.999**		
135.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**-**	**337.999**	**-**	**-**	**-**	**337.999**		
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**-**	**337.999**	**-**	**-**	**-**	**337.999**		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	326.170	-	-	-	326.170	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	326.170	-	-	-	326.170	030@	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	11.829	-	-	-	11.829	04 . 51	
	(04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)								
01	RM	-	11.829	-	-	-	11.829	030@	
	JUMLAH	**-**	**337.999**	**-**	**-**	**-**	**337.999**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7610-3581-9074-4727

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode/Nama Satker : (693147) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693147**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	19.270	11.950	11.780	11.360	11.884	11.456	12.530	9.770	0	237.999	337.999
		BELANJA BARANG	0	0	19.270	11.950	11.780	11.360	11.884	11.456	12.530	9.770	0	237.999	337.999
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	0	19.270	11.950	11.780	11.360	11.884	11.456	12.530	9.770	0	237.999	337.999
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	19.270	11.950	11.780	11.360	11.884	11.456	12.530	9.770	0	237.999	337.999

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2025
IV A. B L O K I R

DS:7610-3581-9074-4727

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693147] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
693147	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA**				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	989
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	237.999		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	52 Belanja Barang	Rp.	237.999		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
135.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**				521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	250
7143.ABD	**Kebijakan Bidang Hukum dan HAM**				Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521211 Belanja Bahan(RM)				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	60.134				
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	6.000				
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	18.800				
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	128.026				
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	23.800				
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
7143.AEF	**Sosialisasi dan Diseminasi**						
	521211 Belanja Bahan(RM)						

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693147/2025
IV B. C A T A T A N

DS:7610-3581-9074-4727

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693147] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001